

# BPKRI Nilai Kapuas Hulu Tiga Terbaik Pengelolaan Keuangan

## Yusuf: WDP Harus Jadi WTP

Putussibau, BERKAT.

Dalam Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Negara atau Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sampai dengan semester 1 tahun 2012. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Kabupaten Kapuas Hulu masuk kabupaten tiga terbaik dalam penataan keuangannya.

"Kapuas Hulu bersama Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak memperoleh skor tertinggi dalam penilaian BPK, yaitu 45 hingga 47 dari skor paling tinggi 50. Ini dikeluarkan langsung BPKRI Kalbar dalam pertemuan gedung BPKRI Kalbar di Pontianak yang juga dihadiri Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana SH dan Kepala Inspektorat

Kapuas Hulu, Drs. Syafaruddin, MM," papar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, M. Yusuf Habibi kepada insan pers di kantornya.

Mekanisme yang terjadi sebelumnya, urai Yusuf, dalam laporan keuangan yang diaudit oleh BPK ditemukan adanya kesalahan yang menjurus pada kerugian negara dan daerah. Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

"Setelah diperbaiki kita dapat yang terbaik dari 14 Kabupaten atau Kota, pada semester pertama dari pemeriksaan di bulan Januari hingga Juni 2012 ini," terangnya.

Terkait hasil ini, lanjut Yusuf, diharapkan secara bersama-sama unsur pimpinan Daerah bisa mempertahankan

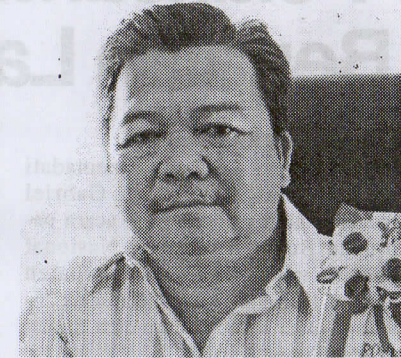
dan bahkan meningkatkan kualitas kerja guna mencapai skor tertinggi yaitu 50 dalam penilaian BPK selanjutnya.

"Kita juga berharap pemeriksaan mendatang Kapuas Hulu dari wajar dengan pengecualian (WDP) bisa menjadi wajar tanpa pengecualian WTP seperti halnya Kota Madya, Pontianak," kata Yusuf.

Terkait dengan pembenahan kedepan, diutarakan Yusuf, salah satu target yang harus diperbaiki adalah pada bidang aset dan keuangan daerah.

Disamping itu juga perlu adanya pembenahan terhadap laporan rumah sakit, penyertaan modal.

"Ini harus dibenahi dan instansi-Instansi yang ada harus saling mendukung agar bisa tercapai WTP. Aset itu juga



YUSUF HABIBI.

perlu diperhatikan lebih intensif dan harus kita telusur ulang untuk penataan dan pendataan kembali, namun tentu hal tersebut butuh dana dan dukungan APBD," lanjutnya.

"Ini yang salah tidak semata-mata yang berwenang dalam hal aset tersebut tapi yang kita lihat juga aset itu sendiri bermasalah, seperti tanah setelah di hibah, anaknya menuntut. Untuk itu kita wajib tertib administrasi, agar semua terlindungi dan sesuai hukum berlaku," pesan Yusuf. (nes)